



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

BUPATI LUWU TIMUR
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 216
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR

Meningkatkan : Beras untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, serta menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Meningkatkan : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5799);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

- Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Manajemen Pendataan Profil Desa dan Kelurahan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
 12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. *Sh*

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Manajemen Pegawai Profile Desa dan Kelurahan;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknik Pemilihan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa Kelurahan Desa Kabupaten Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
- 12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Hukam Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11).

MENYUTUKAN:

Mengapalkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

4. Desa adalah Desa dan Desa Adat, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
11. Unsur Staf Perangkat Desa adalah staf yang dapat diangkat Kepala Desa untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
12. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD .
14. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Struktur Organisasi

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu :
 - a. urusan tata usaha dan umum;
 - b. urusan keuangan; dan
 - c. urusan perencanaan. 91

4. Desa adalah Desa dan Desa Adat, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu petanekat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pembagian kerja.
11. Unsur Staf Perangkat Desa adalah staf yang dapat diangkat Kepala Desa untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
12. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI
 Bagian Kesatu
 Struktur Organisasi

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu:
 - a. urusan tata usaha dan umum;
 - b. urusan keuangan; dan
 - c. urusan pemerintahan.

- (3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 2 (dua) urusan yaitu :
 - a. urusan umum dan perencanaan; dan
 - b. urusan keuangan.
- (4) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Kepala Dusun atau sebutan lain.
- (3) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, kesulitan medan, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (4) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksana Kewilayahan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu :
 - a. seksi pemerintahan;
 - b. seksi kesejahteraan; dan
 - c. seksi pelayanan.
- (3) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu :
 - a. seksi pemerintahan; dan
 - b. seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bendahara;
 - b. pengurus barang;
 - c. operator komputer; dan
 - d. pengelola perpustakaan.
- (3) Selain unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat mengangkat Perangkat Desa lainnya sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. 41

- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 2 (dua) urusan yaitu :
 - a. urusan umum dan perencanaan; dan
 - b. urusan keuangan.
- (4) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus melaksanakan tugas pembantuan Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Kepala Dusun atau sebutan lain.
- (3) Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibuktikan dengan kemampuan keuangan desa serta memperthatikan luas wilayah kerja, kesatuan medan, karakteristik geografis, jumlah penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (4) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyusunan pemerintahan desa
 - b. pelaksanaan pembangunan desa
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
 - d. pembantuan masyarakat desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksana Kewilayahan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus melaksanakan tugas pembantuan Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu :
 - a. seksi pemerintahan
 - b. seksi kesejahteraan, dan
 - c. seksi pelayanan.
- (3) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu :
 - a. seksi pemerintahan dan
 - b. seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pembantu;
 - b. pengurus barang;
 - c. operator komputer; dan
 - d. pengelola perpustakaan.
- (3) Selain unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat mengangkat Perangkat Desa lainnya sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
 - b. melaksanakan pembangunan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki fungsi :
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
 - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga serta karang taruna; dan
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Sekretaris desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
 - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. 41

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
 - b. melaksanakan pembangunan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki fungsi:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata pemerintahan, penataan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketertarikan dan ketertidatan, melakukan upaya peningkatan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penata serta pengelolaan wilayah;
 - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketentraman;
 - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga serta karang taruna; dan
 - e. menajaga hubungan komitmen dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Sekretaris desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. melaksanakan urusan umum seperti urusan administrasi pertanahan desa, penyediaan prasarana pertanahan desa dan kantor, penyajian laporan, pengadministrasian aset, inventarisasi, pembelian dinas, dan pelayanan umum;
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Pegawai Desa, EBP, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
 - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, mengadministrasi data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa dalam PTPKD.
- (2) Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Pasal 10

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.
- (3) Kepala Urusan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, serta pelayanan umum;
 - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, serta lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
 - c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- (4) Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 11

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sekaligus sebagai petugas/pengurus aset desa.
- (2) Petugas/pengurus aset desa bertugas dan bertanggungjawab :
 - a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APB Desa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. melakukan inventarisasi aset desa;
 - d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa. 41

Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa dalam PTPKD.
- (2) Koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;
 - b. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - c. melakukan penendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
 - d. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Pasal 10

- (1) Kepala urusan berkewajiban sebagai unsur staf sekretaris.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.
- (3) Kepala Urusan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, surat, arsip, kepegawaian, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan sarana perangkat desa dan kantor, penyajian laporan, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, serta pelayanan umum;
 - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, serta lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
 - c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisasi data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- (4) Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 11

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sekurang-sebagainya bertugas/pengurus aset desa.
- (2) Petugas/pengurus aset desa bertugas dan pertanggungjawab:
 - a. melaksanakan rencana kebutuhan aset desa;
 - b. mengajukan permohonan pembelian/pengadaan aset desa yang diperoleh dari beban APB Desa dan pengeluaran lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. melakukan inventarisasi aset desa;
 - d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelola; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.


Pasal 12

- (1) Kepala Urusan Keuangan dibantu oleh Unsur Staf Perangkat Desa yakni Bendahara.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- (3) Bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (5) Bendahara sebagai PPTKD membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
- (6) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan buku sebagai berikut
 - a. kas umum;
 - b. buku kas pembantu pajak; dan
 - c. buku bank.
- (7) Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa melalui Kepala Urusan Keuangan dan Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 13

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
 - b. kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
 - c. kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 14

- (1) Kepala Seksi sebagai PPTKD bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa; 

Pasal 12

- (1) Kepala Urusan Keuangan dibantu oleh Urusan Staf Perencana Desa yakni Bendahara
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menyalurkan, memfasilitasi, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBD Desa
- (3) Bendahara sebagai wajib pajak orang pribadi dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan rumpuk buku setiap akhir bulan secara terip
- (5) Bendahara sebagai PPKD membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa
- (6) Penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan buku sebagai berikut:
 - a. kas umum;
 - b. buku kas pembantu pajak; dan
 - c. buku bank
- (7) Bendahara wajib mempertanggungjawabkan setiap laporan pertanggungjawaban yang diumumkan setiap bulan kepada Kepala Desa melalui Kepala Urusan Keuangan dan Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

Pasal 13

- (1) Kepala seksi bertanggung jawab sebagai unsur pelaksana teknis
- (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional
- (3) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata laksana pemerintahan, menerima dan menyampaikan laporan, pemantauan masalah pemerintahan, pembinaan pemerintahan dan ketertarikan pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependidikan, perantara dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolan Profil Desa;
 - b. kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pelayanan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang: budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
 - c. kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan pelayanan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelayanan nilai sosial budaya masyarakat, keasrahan, dan kebergairahan

Pasal 14

- (1) Kepala Seksi sebagai PPKD bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau kerjasama lapangan

f

- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 15

Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, dan Kepala Seksi Pelayanan dapat dibantu oleh Unsur Staf Perangkat Desa lainnya dengan memperhatikan beban kerja dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 16

- (1) Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB III

PENYUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa, dengan mengacu pada kebutuhan dan kemampuan keuangan desa, potensi dan ketersediaan sumber daya manusia, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa tercantum dalam Lampiran I, II, III, dan IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan yang mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi tata kerja Pemerintah desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disosialisasikan kepada masyarakat sebelum disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas bersama antara Kepala Desa dengan BPD sesuai dengan peraturan tata tertib BPD. 4

- c. melakukan tindakan pengalihan yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengalihkan pelaksanaan kegiatan Kepala Desa;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Kepala Desa; dan
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 15

Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, dan Kepala Seksi Pelayanan dapat diberi oleh unsur Staf Kecamatan Desa lainnya dengan memperhatikan beban kerja dan kemampuan kerjanya desa.

Pasal 16

- (1) Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun bertanggung jawab sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi:
 - a. pembinaan ketertarikan dan keaktifan pelaksanaan tugas pemerintahan masyarakat, mobilisasi penduduk, dan pembinaan dan pengelolaan wilayah;
 - b. pengawasan pelaksanaan pembinaan di wilayahnya;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB III
PENYUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa, dengan mengacu pada kebutuhan dan kemampuan keuangan desa, potensi dan ketersediaan sumber daya manusia, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa tercantum dalam Lampiran I, II, III, dan IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan yang mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi tata kerja Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disosialisasikan kepada masyarakat sebelum disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama antara Kepala Desa dengan BPD sesuai dengan peraturan tata tertib BPD.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal persetujuan bersama antara Kepala Desa dengan BPD.
- (2) Hasil evaluasi diserahkan oleh Camat kepada Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Camat tidak melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa dalam batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka rancangan Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya.
- (4) Kepala Desa bersama BPD wajib melaksanakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Kepala Desa dan BPD yang menetapkan rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa tanpa melaksanakan hasil evaluasi, maka Camat mengusulkan kepada Bupati untuk membatalkan Peraturan Desa tersebut.

BAB IV
WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kepala Desa

Pasal 20

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(2) berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat desa;
 - g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berhak :
 - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa. 51

Pasal 19

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Kepala Desa Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal pelaksanaan urusan antara Kepala Desa dengan BPD.
- (2) Hasil evaluasi diserahkan oleh Camat kepada Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah selesai dilaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Camat tidak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penyelenggaraan Pemerintahan Desa berlaku dengan sendirinya.
- (4) Kepala Desa bersama BPD wajib melaksanakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Kepala Desa dan BPD yang menegakkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa menjadi Pemerintahan Desa tanpa melakukan hasil evaluasi, maka Camat mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan Pemerintahan Desa tersebut.

BAB IV
WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Kepala Desa

Pasal 20

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bertanggung jawab:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengorganisir dan memelihara Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. memimpin pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - d. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - e. memimpin kehidupan masyarakat desa;
 - f. memimpin ketertarikan dan ketertarikan masyarakat desa;
 - g. memimpin dan meningkatkan perekonomian desa secara bertanggung jawab agar terwujud peningkatan skala produksi untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat;
 - h. mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - i. memelihara dan memelihara seluas-luasnya ketertarikan masyarakat desa;
 - j. meningkatkan kesejahteraan sosial budaya masyarakat desa;
 - k. melaksanakan teknologi tepat guna;
 - l. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - m. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau memajukan kelas hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berhak:
 - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa;
 - b. mengajukan anggaran dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap, pensiun, dan tunjangan, dan pemerintahan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakannya; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berkewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola keuangan dan aset desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.
- (4) Kepala Desa dalam melaksanakan kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat(1), ayat (2) dan ayat (3), wajib :
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
 - d. memberikan dan/atau menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.
- (5) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilarang :
- a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat

- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berkewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara ketertarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. memelihara ketertarikan dan ketertarikan masyarakat desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan ketertarikan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola keuangan dan aset desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. menyelenggarakan pertetarikan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
 - m. membina dan memelihara nilai sosial budaya masyarakat di desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga masyarakat di desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan memelihara lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.
- (4) Kepala Desa dalam melaksanakan kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) wajib :
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Perwakilan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
 - d. memberikan dan/atau menyetujui informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.
- (5) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibarengi :
- a. menarik kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan menyalahgunakan ketertarikan masyarakat desa;
 - f. menyalahgunakan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi tertetarik;
 - i. menyangkal jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Perwakilan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Perwakilan Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
- (3) Kepala Desa melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.

Bagian Kedua Perangkat Desa

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam melaksanakan tugas berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berkewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola keuangan dan aset desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat desa. 91

- i. peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar aturan (jarif) jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam representasi kekayaan milik desa yang dibisakan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD Desa;
 - b. menetapkan PPKD;
 - c. menetapkan batas yang melingkupi pemertanian desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang diadakan dalam APB Desa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
- (3) Kepala Desa melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan Petakana Teknik Pengelolaan Keuangan Desa.

Bagian Kedua
Tata Kelola Desa
Pasal 22

- (1) Petangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam melaksanakan tugas berhak menerima penghargaan, tunjangan, dan jaminan kesehatan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan.
- (2) Petangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berkewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara ketertarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. menyukseskan kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. memelihara ketertarikan dan kerajinan masyarakat desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kewajibannya dan bertanggung jawab; dan
 - f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjaga kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola keuangan dan aset desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
 - m. memimpin dan membina nilai sosial budaya masyarakat desa;
 - n. memberdayakan masyarakat di lingkungan konsultasikan di desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.

- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilarang :
- a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga
Unsur Staf Perangkat Desa

Pasal 23

- (1) Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan.
- (2) Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilarang :
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - j. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - k. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. 91

- (3) Peringkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diartikan :
- a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan tugas, hak dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan merugikan masyarakat desa;
 - f. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mengengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. menangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Penyelenggara Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. menanggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga
 Urus Staf Peringkat Desa

Pasal 23

- (1) Urus Staf Peringkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan pensiun lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan.
- (2) Urus Staf Peringkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diartikan :
- a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan tugas, hak dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan merugikan masyarakat desa;
 - f. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mengengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - j. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - k. menanggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 24

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bertanggungjawab memimpin, mengkoordinir dan memberikan bimbingan serta petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugasnya.

BAB V HARI DAN JAM KERJA

Pasal 25

Hari kerja Kantor Desa adalah 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat.

Pasal 26

Jumlah jam kerja efektif dalam pelaksanaan 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.

Pasal 27

- (1) Jam kerja dalam pelaksanaan 5 (lima) hari kerja ditetapkan sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis Pukul 07.30-16.00 Wita;
istirahat siang Pukul 12.00-13.00 Wita;
 - b. hari Jumat Pukul 07.30-16.30 Wita; dan
istirahat siang Pukul 11.30-13.00 Wita.
- (2) Pelaksanaan absensi perangkat desa dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) hari yaitu :
 - a. absensi pertama masuk kerja pagi Pukul 07.30 Wita;
 - b. absensi kedua istirahat siang Pukul 12.00 Wita;
 - c. absensi ketiga masuk siang Pukul 13.00 Wita;
 - d. absensi keempat pulang kerja Pukul 16.00 Wita;
 - e. absensi kedua pada hari Jumat Pukul 11.30 Wita; dan
 - f. absensi keempat pada hari Jumat Pukul 16.30 Wita.

Pasal 28

- (1) Upacara dan Olah Raga/Senam dilaksanakan pada :
 - a. upacara bendera hari Senin dilaksanakan Pukul 07.30 Wita; dan
 - b. olah raga/senam dilaksanakan hari Jumat Pukul 07.30 Wita.
- (2) Penandatanganan Daftar Hadir dapat dilakukan 15 menit sebelum mulai jam kerja dan 15 menit sebelum berakhirnya jam kerja yang telah ditentukan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan yang meliputi :
 - a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan kabupaten yang dilaksanakan oleh desa;
 - b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 24

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bertanggungjawab memimpin, mengkoordinir dan memberikan bimbingan serta petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugasnya.

BAB V
HARI DAN JAM KERJA

Pasal 25

Hari kerja Kantor Desa adalah 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat.

Pasal 26

Jumlah jam kerja efektif dalam pelaksanaan 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.

Pasal 27

(1) Jam kerja dalam pelaksanaan 5 (lima) hari kerja ditetapkan sebagai berikut :

- a. hari Senin sampai dengan hari Kamis istirahat siang
 - b. hari Jumat istirahat siang
- (2) Pelaksanaan absensi perangkat desa dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) hari yaitu :
- a. absensi pertama masuk kerja pagi
 - b. absensi kedua istirahat siang
 - c. absensi ketiga masuk siang
 - d. absensi keempat pulang kerja
 - e. absensi kedua pada hari Jumat
 - f. absensi keempat pada hari Jumat

Pasal 28

- (1) Upacara dan Olah Raga/Senam dilakukan sebagai berikut :
- a. upacara budaya hari Senin dilaksanakan pukul 07.30 Wita; dan
 - b. olah raga/senam dilaksanakan hari Jumat pukul 07.30 Wita.
- (2) Penandaan Datar Hadir dapat dilakukan 15 menit sebelum mulai jam kerja dan 15 menit sebelum berakhirnya jam kerja yang telah ditentukan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan yang meliputi :
- a. memberikan pedoman pelaksanaan program urusan kepada yang dilaksanakan oleh desa;
 - b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- e. melakukan evaluasi dan pengawasan Pengaturan Desa;
- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;
- g. mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- l. melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- m. melakukan peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa dan lembaga kerjasama antar Desa; dan
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. *SH*

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	
SEKDA	PARAF
ASISTEN	
KEPALA BPMPD	
SEKRETARIS	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 21 april 2016
BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 21 april 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR


BAHRI SULI

- g. menetapkan lokasi dan penempatan untuk desa
- h. melakukan evaluasi dan penataan kembali desa
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap desa
- j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap desa
- k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap desa
- l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap desa
- m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap desa
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap desa
- o. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap desa
- p. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap desa
- q. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap desa
- r. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap desa
- s. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap desa
- t. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap desa
- u. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap desa
- v. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap desa
- w. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap desa
- x. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap desa
- y. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap desa
- z. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap desa

BAR VII
KENTUAN TUNTUP

Pasal 30
Kerangka lain lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan pemerintah desa tingkat desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 31
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Setelah diundangkan, pemerintah kabupaten melaksanakan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal
BUPATI LUWU TIMUR

MUL THORIG HUSLER

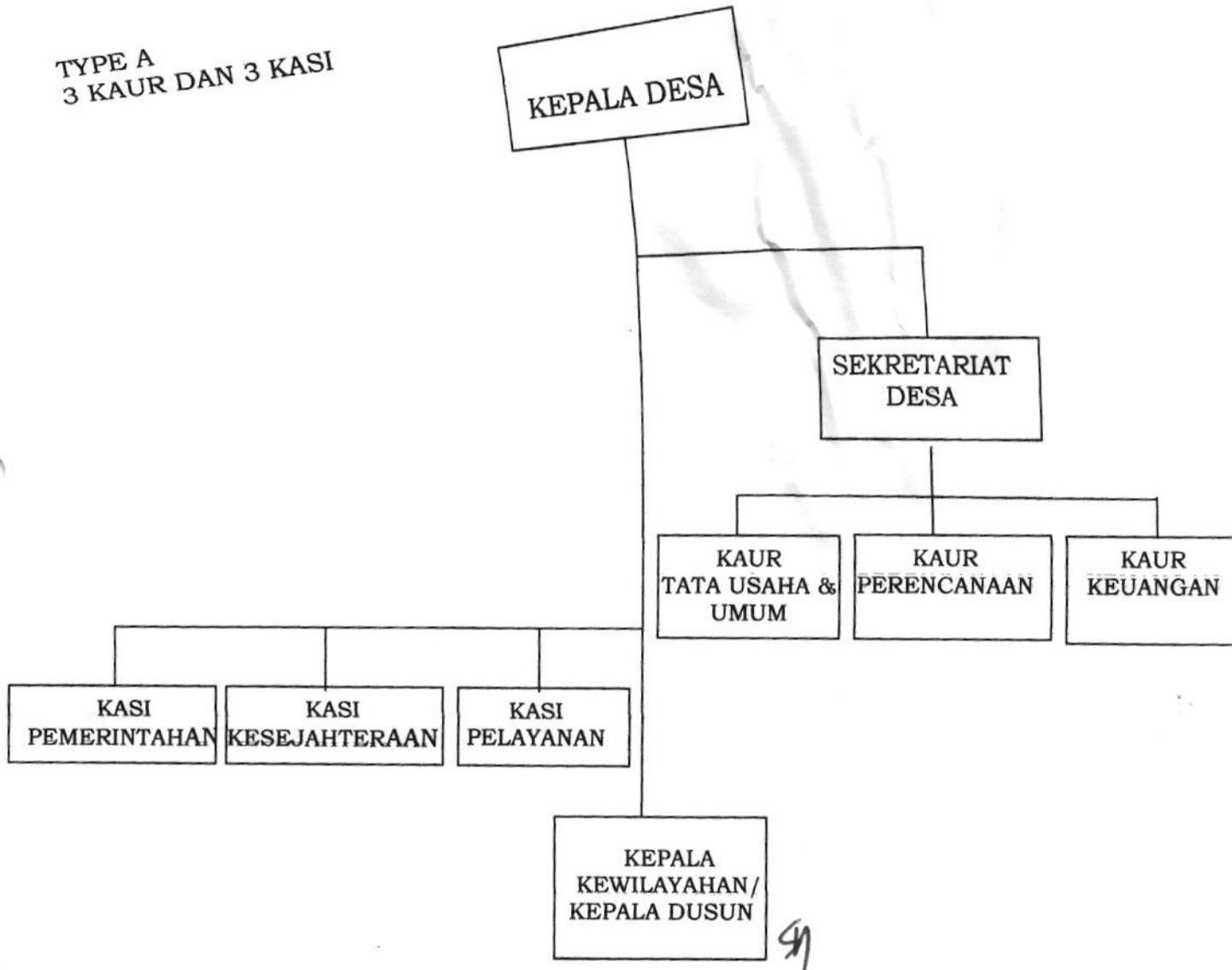
PEMBAK
KABUPATEN

Diundangkan di Malili
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BAHRI SULI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

TYPE A
3 KAUR DAN 3 KASI



STEMPEL PARAF KOORDINASI

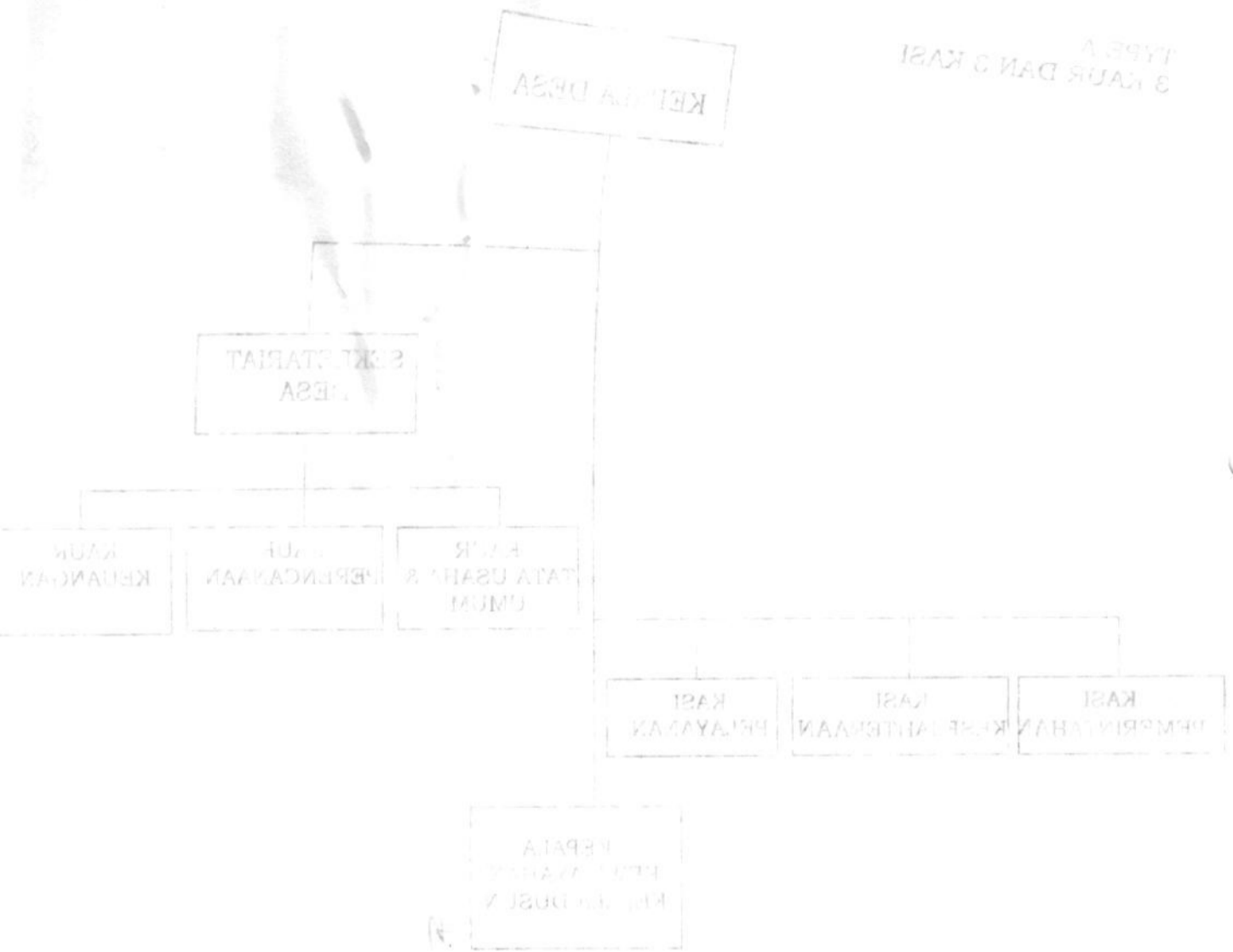
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	L
ASISTEN	+
KEPALA BPMPD	[Signature]
SEKRETARIS	[Signature]

BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
MUH. THORIG HUSLER

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LUWITIMUR
 TAHUN 2016
 NOMOR
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

TYPE A
 3 KAWAN DAN 3 KASI

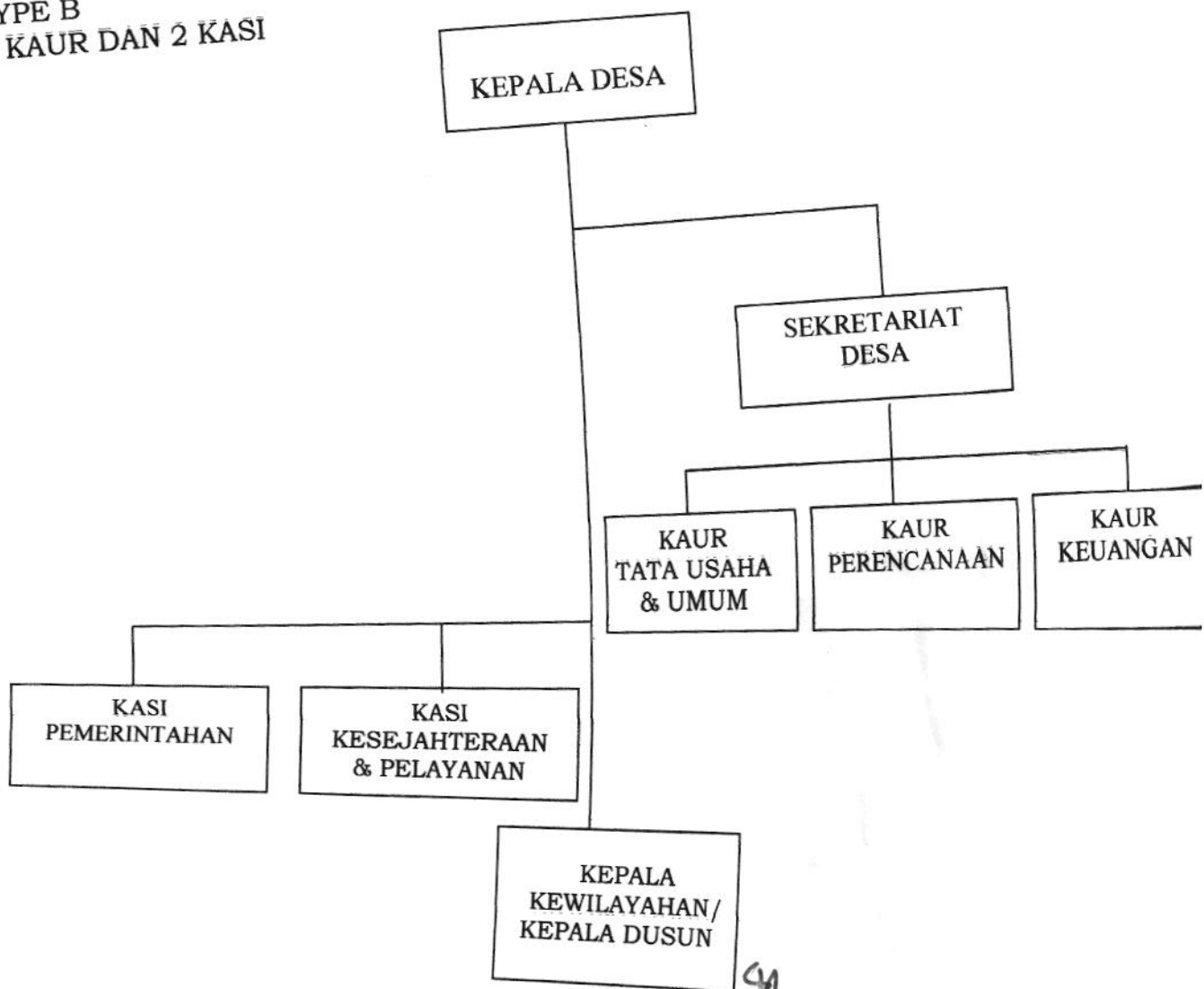


BUPATI LUWITIMUR
 DR. THORIC HUSLER

KEPADA KEMERDEKAAN BERAYAHAN
 BEMPD

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

TYPE B
3 KAUR DAN 2 KASI



STEMPEL PARAF KOORDINASI

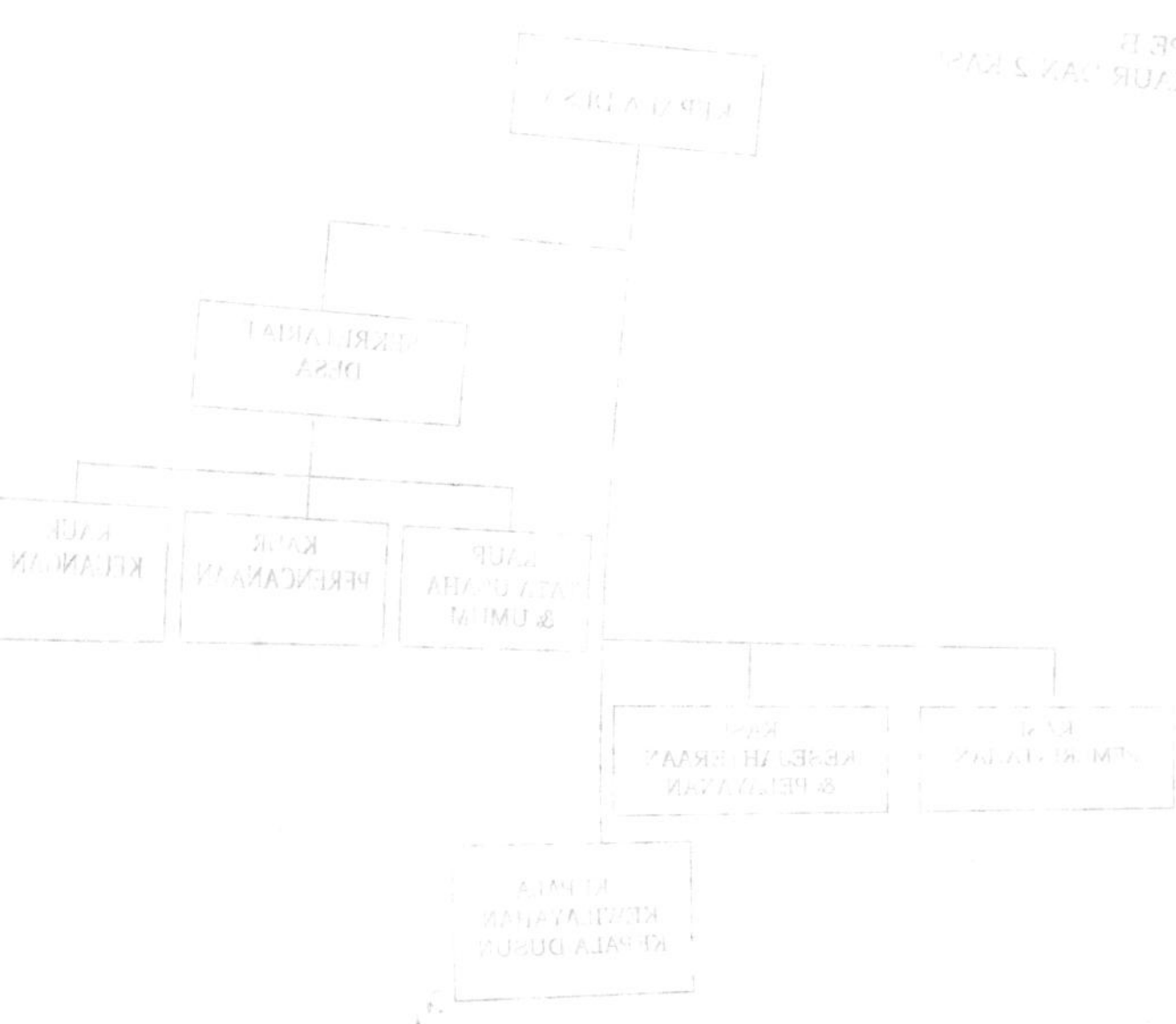
STEMPEL PARAF KOORDINASI	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KEPALA Bpmpd	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
MUH. THORIG HUSLER

LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI TIMOR LESTE
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
NOMOR TAHUN 2010

TYPE B
2 KUR DAN 2 KAS



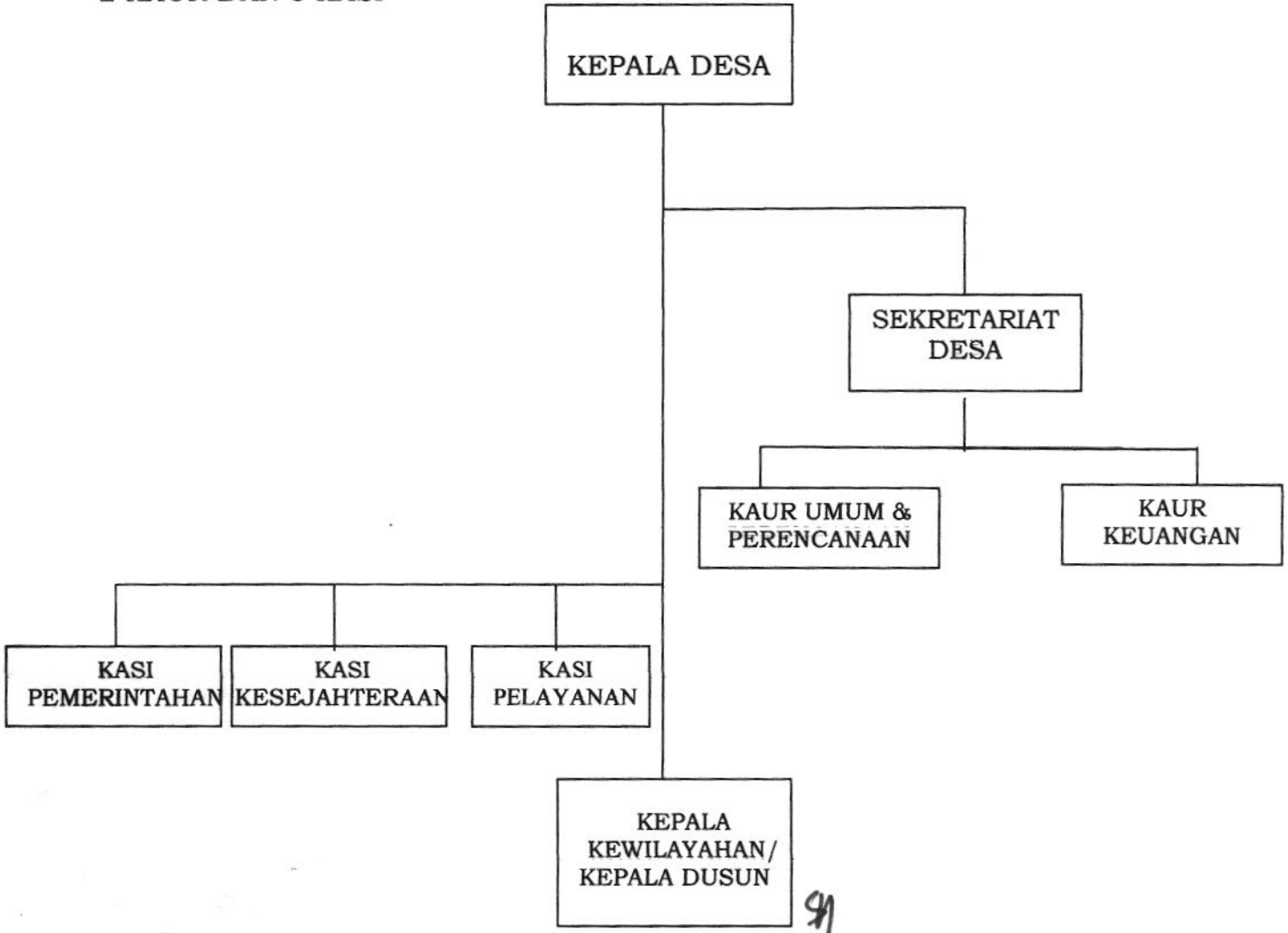
BUPATI TIMOR LESTE

MUJIB THORIG HUSLER

KEPALA DESA
MULI THORIG HUSLER

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

TYPE C
2 KAUR DAN 3 KASI



STEMPEL PARAF KOORDINASI

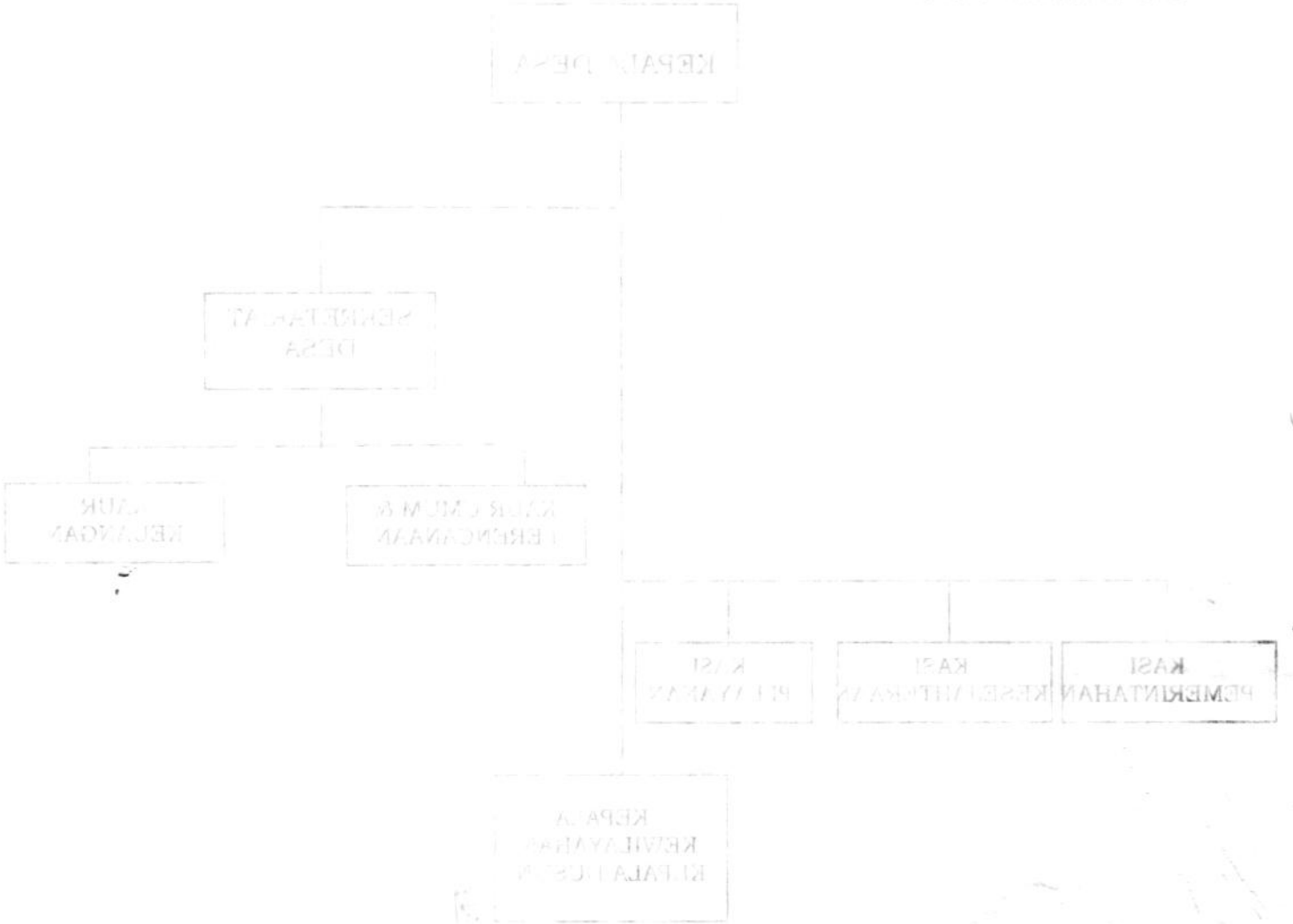
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KEPALA BPMPD	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
MUH. THORIG HUSLER

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUWATI
NOMOR ... TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Tipe C
2 Kaur dan 3 Kasi

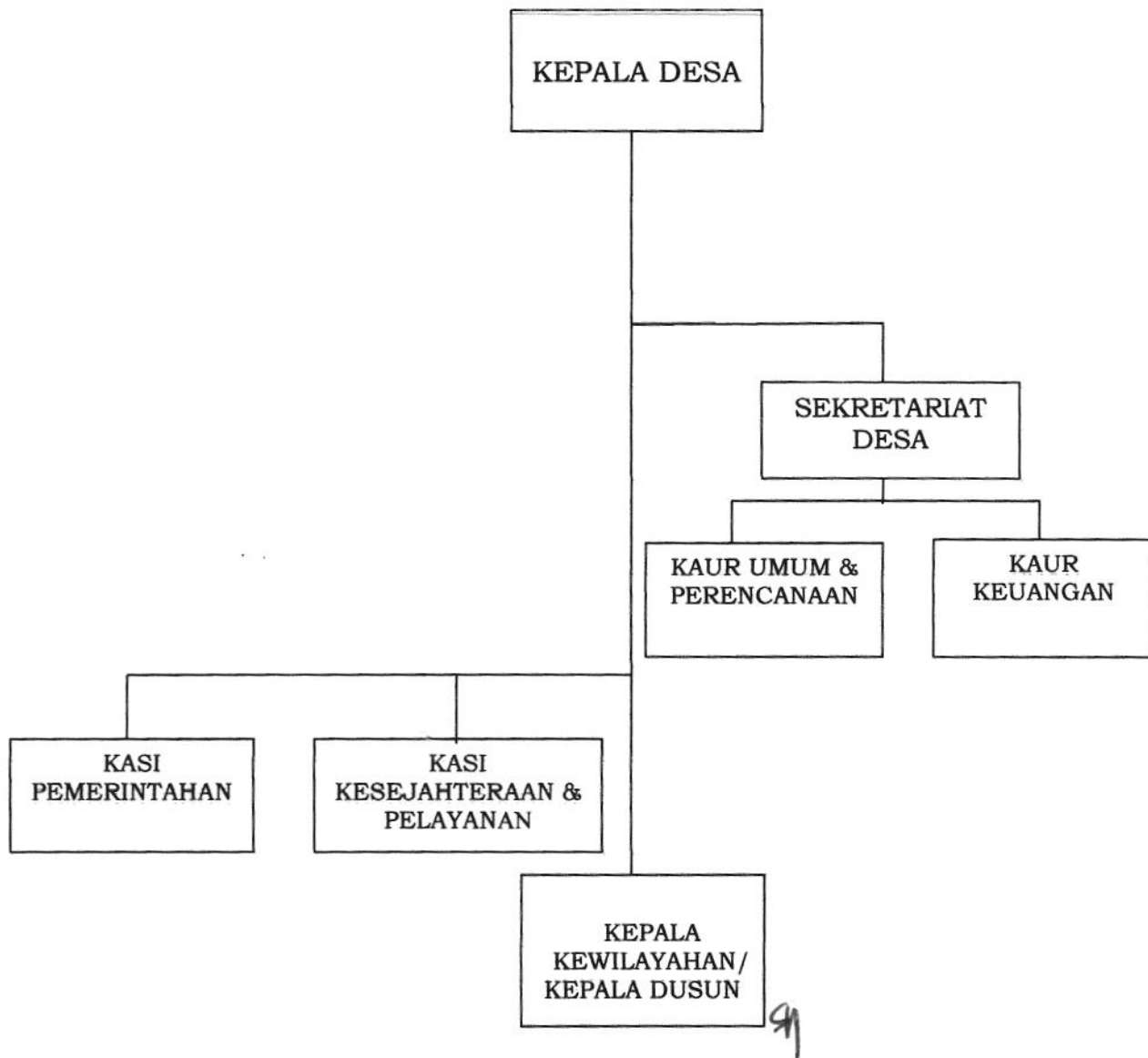


MUN. THOTIC HUSBET
BUPATI SUWATI TIMUR

KEP. DESA
SUWATI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

TYPE D
2 KAUR DAN 2 KASI



STEMPEL PARAF KOORDINASI

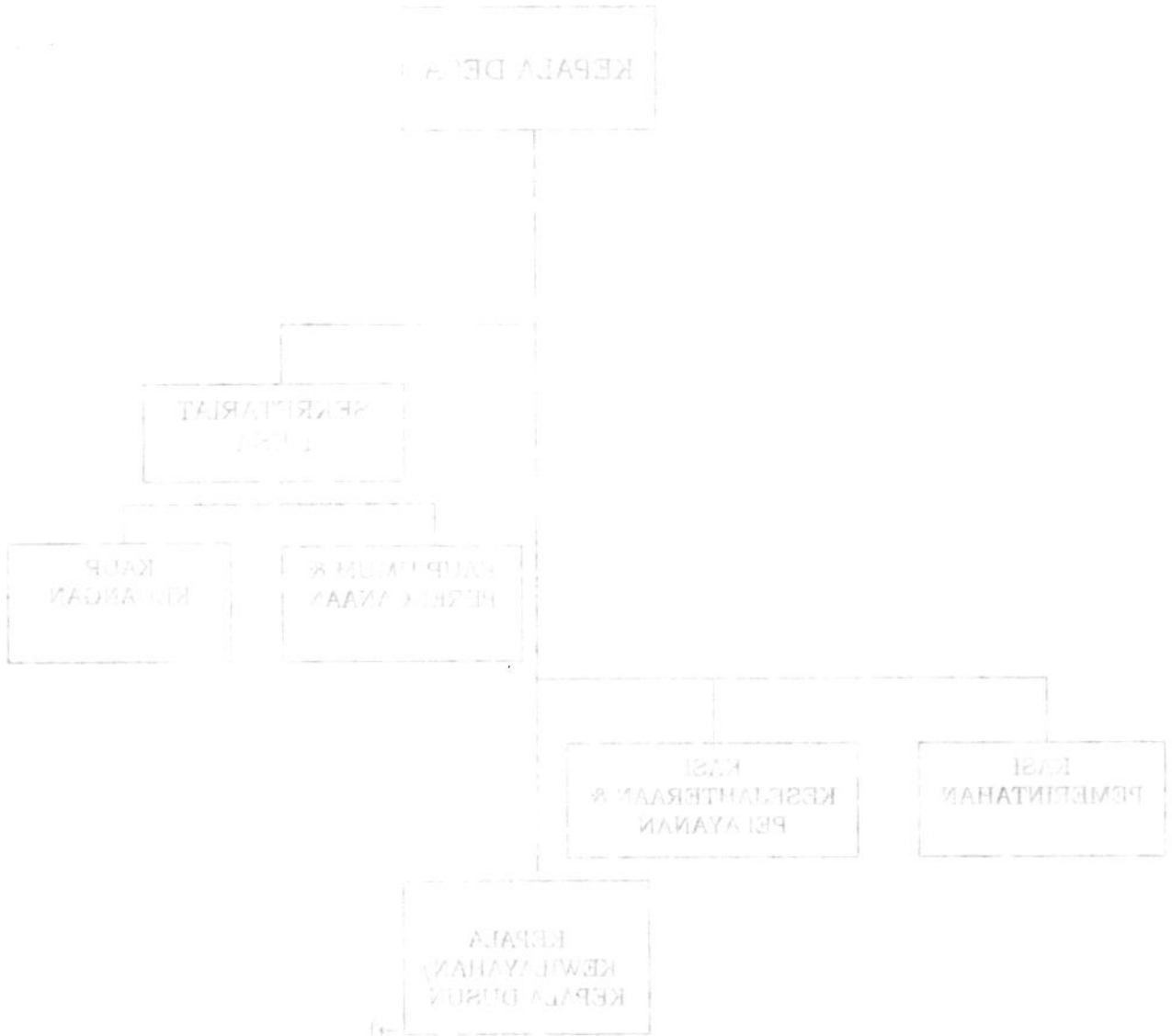
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	[Signature]
ASISTEN	[Signature]
KEPALA Bpmpd	[Signature]
SEKRETARIS	[Signature]

BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
MUH. THORIG HUSLER

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUWARU TIMUR
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

TYPE D
2 KAUH DAN 2 KASI



BUPATI KUWARU TIMUR
MUR THORIG HUSLER

KEPALA DESA